

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagai provinsi yang mempunyai lebih dari 5000 pondok pesantren¹ dan 1.169.256 santri, Jawa Timur jelas mempunyai karakteristik dan modal sosial tersendiri dalam melakukan proses pembangunan. Secara sosio-historis, perjalanan panjang pesantren setidaknya telah menunjukkan realitas tersebut, yakni pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan agama dan lembaga sosial kemasyarakatan (Amin Haidari 2005).

Hal serupa juga diungkapkan oleh M.M Bilah (1985; 293). Baginya, pesantren memiliki dua fungsi dasar dalam proses pembangunan nasional. *Pertama*, kemampuan sebagai *centre of excellence* untuk *penggemblengan* bagi pemikir agama (*religious intellectual*). fungsi ini memaksa pesantren untuk berkembang menjadi pusat studi keagamaan dan kemasyarakatan. *Kedua*, pesantren berfungsi sebagai *agent of development* yang menangani pembinaan pemimpin masyarakat (*community leader*) yang menuntut pesantren menjadi pionir dalam program-program pengembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, pada titik ini, pesantren telah menahbiskan diri sebagai institusi pendidikan, dakwah sekaligus lembaga social.

Secara kultural, karakteristik masyarakat pesantren yang bercirikan patron-klien termasuk menjadi salah alasan mengapa mereka menjadi modal sosial pembangunan. Pola hubungan patron-klien dalam pesantren, mengantarkan kiai menempati hirarkhi tertinggi dalam stratifikasi sosial di pesantren, sedangkan santri sebagai klien yang selalu tergantung dengan patronase kiai. Perilaku kiai sehari-hari tidak hanya dapat dimaknai sebagai aktifitas manusia semata-mata yang dapat salah atau keliru, namun dapat bermakna sebagai implementasi dari “kepentingan suci” agama yang termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk hubungan semacam ini mampu membentuk terciptanya basis massa dengan militansi tinggi untuk membela kepentingan pesantren, atau lebih sederhana dapat juga disebut membela kepentingan kiai.

¹ Data dari Bagian Perencanaan dan Data, Setditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama R.I 2008-2009.

Clifford Geertz, dalam *The Javanese Kijaji: the Changing roles of a cultural broker* (1960) menyebut kiai sebagai “makelar budaya” (*cultural brokers*). Hasil obyektifikasi di Mojokuto Pare, Kediri Jawa Timur yang dilakukan Geertz ini menganggap bahwa kiai bertindak menghubungkan pesantren dan budaya luar. Sebagai “makelar”, ia berhak menyaring unsur budaya yang boleh masuk atau tidak. Dalam keadaan demikian kiai akan kehilangan fungsinya sebagai perantara dalam arus perubahan masyarakat yang berlangsung cepat. Kiai kehilangan perannya tersebut, lalu hanya menjalankan posisi sekunder dan tak lagi kreatif.

Dalam konsep yang berbeda, Hiroko Horikoshi (1987) yang meneliti peran ajengan di di Garut Jawa Barat mengembangkan konsep Geertz tersebut. Menurutnya, kiai tidak lagi berpretensi dalam posisi makelar budaya, namun Horikoshi menempatkan kiai sebagai *enterpreuner* yang dengan kreatif melakukan gerak transformasi sosial. Ia menunjukkan bahwa kiai tidak berpretensi meredam gejolak perubahan yang terjadi, melainkan dengan kreatif memelopori perubahan sosial yang terjadi. Ia bukan melakukan penyaringan informasi, tetapi menawarkan agenda perubahan nyata yang relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Seturut dengan pandangan tersebut, dalam konteks perjalanan demokrasi-politik di Indonesia, beberapa ahli cukup *gamblang* secara kualitatif mendeskripsikan peran pesantren dan santrinya dalam pergulatan proses demokratisasi. Diantaranya adalah Martin Van Bruinessen dalam bukunya *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (2012) dan *NU; Tradisi, Relasi-Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (1994). Bruinessen dalam kedua karyanya tersebut menjelaskan bagaimana kaum pesantren melakukan rekonstruksi wacana keagamaan dalam proses menyelesaikan problem social-agama, ekonomi dan politik di tanah air pada tahun 1990an. Pula Andree Feillard dalam karyanya *NU Vis-a-Vis Negara* (1999), Muhammad AS Hikam ‘*Nahdlatul Ulama, Civil Society dan Proyek Pencerahan*’ (1999), Lukman Hakim dalam buku ‘*Perlawanan Islam Kultural*’ (2004), dan sebagainya.

Namun demikian, disisi lain realitas politik Indonesia juga menampilkan wajah minor dalam memaknai peran komunitas pesantren. Bagi kebanyakan politisi baik nasional maupun regional sering menjadikan kiai, keluarga pesantren, tokoh pesantren dan santri sebagai lahan sasaran dalam membangun basis kepentingan politiknya. Pada

tiga periode pemilihan umum nasional tahun 1999, 2004 dan 2008, bukan partai-partai politik berbasis ideologi Islam –seperti PPP- saja yang berebut pengaruh dikalangan kiai dan pesantren, melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis, seperti Golkar dan PDIP. Dalam upaya meraup simpati dari kalangan komunitas Islam yang menjadi pengikut setia kiai, kedua partai politik tersebut menempatkan beberapa kiai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus teras partainya serta menempatkan mereka pada posisi “calon jadi” dalam Pemilu. Bahkan dalam pemilu tahun 1992 dan 1997 sebelum bergulirnya reformasi, ada sekian banyak fakta yang menunjukkan kedekatan tokoh pesantren pada partai yang tidak berazaskan Islam. Hal ini dapat dilihat dari kedatangan Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut; *baca*) sebagai tokoh Golkar dan Megawati sebagai tokoh PDIP ke kantong-kantong massa NU di Jawa Timur dengan diantar Gus Dur yang menjadi Ketua Umum PBNU.

Bentuk perilaku politik seperti diatas, satu sisi memperluas akses politik kalangan muslim tradisional dan sedikit banyak juga memberikan perluasan pengaruh Islam pada berbagai kelompok politik, sebagaimana ditandai dengan munculnya sayap Islam dalam PDIP. Disisi lain, situasi tersebut juga melahirkan fragmentasi politik yang unik dikalangan umat Islam sendiri, berupa terulangnya oportunisme politik di kalangan tokoh-tokoh politik Islam sebagaimana pengalaman era 1950-an. Pergulatan politik antar tokoh Islam sendiri memperlihatkan kuatnya oportunisme di kalangan politisi muslim. Perbedaan afiliasi politik menjadikan mereka nyaris tidak pernah satu suara dalam menyikapi berbagai persoalan politik.

Pluralitas keislaman di Indoensia menjadikan setiap kelompok keagamaan dalam Islam dapat dimanfaatkan sebagai basis pendukung tegaknya setiap kepentingan politik. Hal ini ditandai dengan pesatnya pertumbuhan partai-partai politik Islam secara kuantitatif untuk memperebutkan pengaruh pada lahan politik yang sama. Keterwakilan umat Islam bukan lagi dalam kapasitas perbedaan *platform* ideologis atau bermakna pembelaan kepentingan umat Islam. Dalam konteks ini, pragmatisme politik praktis bahkan cenderung menjadi lebih menonjol dibanding pembelaan kepentingan komunitas dan agama.

Di kalangan muslim tradisional seperti Nahdlatul Ulama, dimana kiai dan tokoh pesantren menjadi pilar kultural utamanya, muncul beberapa partai politik yang

masing-masing mengklaim sebagai representasi politik komunitas ini. Masing-masing juga berupaya menempatkan beberapa kiai dan tokoh pesantren sebagai motor penggerak ataupun sekedar legitimasi.

Pada masa Orde Baru, posisi kiai dalam kancah politik nasional semakin terpinggirkan, bahkan tidak jarang dicurigai pemerintah, meskipun demikian para kiai tetap eksis dengan perjuangan dan pilihan politiknya. Sebagai contoh dapat dilihat, pada saat kampanye pemilu 1977, kiai Bisyrri Syamsuri dengan kapasitasnya sebagai kiai NU dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, mengeluarkan “fatwa politik”, bahwa setiap muslim diharuskan memilih PPP². Sikap “radikal” Kiai Bisyrri kembali ditunjukkan pada Sidang Umum MPR tahun 1978 dengan melakukan *walk out* yang kemudian diikuti oleh semua anggota DPR/MPR dari PPP, sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang memberi tempat terhormat pada aliran kepercayaan. Dalam perspektif teori politik, tindakan para kiai tersebut merupakan *counters-hegemoni*³. Akibatnya, sejak periode Pemilu Pasca Orde Baru afiliasi politik para kiai dan tokoh pesantren terpecah ke dalam beberapa partai NU. Perpecahan internal yang muncul kemudian juga senantiasa dilegitimasi dengan dukungan dan restu sekelompok kiai tertentu.

Orientasi politik NU sebagai organisasi para kiai dari kalangan Islam tradisional, termasuk dalam kelompok akomodasionis⁴. Meski demikian, dalam berpolitik, sebagian kiai NU terkadang juga menempuh strategi politik militan, tergantung dari kondisi yang dihadapi. Namun secara umum, pandangan politik kiai dan NU lebih bersifat akomodatif⁵. Sementara itu, dalam memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Islam, kiai NU menggunakan substansi daripada cara-cara radikal dan konfrontatif. Pendekatan ini lebih menekankan terjadinya keselarasan dan keharmonisan dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan. Sikap yang demikian ini yang menyebabkan kiai dan NU, oleh sementara orang dituduh sebagai sikap

² Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 234

³ Van ^{Martin} Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 105-106.

⁴ Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indoensia*, (Jakarta: Paramadina, 1998) h. 42

⁵ John Gregory Fealy, *Ulama and Politic in Indoensia A History of Nahdlatul Ulama*. A Desertation Submitted for the Degree of Doctor Philosophy Departemen of History. (Monash University, 1998) h. 225

oportunis⁶; yaitu sebuah motivasi utama politik kiai dan NU dalam merebut materi dan status (kekuasaan). Hal ini dapat dilihat ketika di satu pihak NU bergabung dengan golongan nasionalis untuk melawan Masyumi dan dukungannya terhadap kabinet parlementer, namun pada saat yang sama juga mendukung untuk kembali pada UUD 1945⁷.

Kecenderungan tersebut tampaknya juga terjadi pada arena politik lokal atau daerah. Dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah, kiai dan tokoh pesantren banyak terlibat dalam upaya membangun dukungan politik bagi calon-calon tertentu. Para calon kepala daerah sendiri, bupati maupun gubernur, juga tak henti berupaya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan para politisi partai. Terbelahnya dukungan politik kiai tak terhindarkan lagi dalam meloloskan calon tertentu dalam proses Pilkada. Dalam hal ini kedekatan atau keberhasilan masing-masing calon meraih dukungan kiai atau tokoh-tokoh pesantren menjadi penentu afiliasi dukungan, yang mengakibatkan dukungan politik kiai terbelah kepada beberapa calon berbeda.

Kecenderungan tarik menarik dukungan kiai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahkan nilai politik kiai di hadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan atau pun sekedar legitimasi bagi kepentingan politik masih cukup tinggi. Komunitas elite keagamaan ini masih dipercaya mampu memberikan sumbangan signifikan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik maupun perorangan. Padahal terbelahnya afiliasi politik kiai pada politik partisan tentunya menimbulkan persoalan berkenaan dengan sikap kaum santri yang sebelumnya dikenal memiliki respekasi dan ketaatan tinggi pada kiai.

Dalam realitas demikian itu, kiai berada dalam dua posisi yang kontradiktif⁸. Sebagai elit politik, sesuai dengan paham *sunni*, kiai wajib mentaati pemerintah. Sebagai elit agama, kiai mempunyai kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai agama dengan cara *amar makruf nahi mungkar*. Pada saat yang sama, kiai sebagai

⁶ Van Martin Bruinessen, *NU Tradisi relasi-relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994).

⁷ John Gregory Fealy, *Ulama and Politic in Indonesia A History of Nahdlatul Ulama*. A Desertation Submitted for the Degree of Doctor Philosophy Departement of History. (Monash University, 1998), h. 189

⁸ John Gregory Fealy, *Ulama and Politic in Indoensia A History of Nahdlatul Ulama*. A Desertation Submitted for the Degree of Doctor Philosophy Departement of History. (Monash University, 1998), h. 277

interpreteter ajaran agama yang pandangan dan pemikirannya menjadi referensi. Sebagai elite sosial, kiai menjadi panutan dan sekaligus pelindung masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Multi peran seperti inilah yang seringkali menjadikan kiai bersikap serba salah dan dilematis. Peran dan tanggung jawab kiai terhadap agama, Negara dan masyarakat secara bersamaan, tidak jarang menimbulkan benturan kepentingan yang menjadikan pada posisi sulit.

Perbedaan afiliasi politik kiai juga bukan mustahil menimbulkan respon beragam dari komunitas masyarakat yang sebelumnya menempatkan kiai sebagai *opinion leader* ataupun referensi utama pengambilan keputusan yang harus ditaati. Situasi ini potensial menjadikan kiai dalam konotasi dan lingkup pengaruh kulturalnya yang khas, sebagaimana identifikasi Mastuhu, Zamakhsyari Dlofir ataupun Bruinessen, berubah dari sebelumnya. Bahkan bukan mustahil sebagian kiai telah kehilangan respektasinya karena perbedaan sikap politik. Apalagi sudah jamak diketahui bahwa dalam beberapa kasus afiliasi politik kiai seringkali disertai dengan fasilitas tertentu yang lebih banyak dinikmati kiai dan keluarganya, sementara manfaat yang sama kurang dinikmati para pengikutnya.

Tema penelitian ini menjadi menarik diangkat mengingat beberapa indikator keterlibatan kiai dan kalangan pesantren mulai nampak dalam pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur . Pula semenjak era reformasi bergulir, terjadi mobiltas sosial kaum santri baik pada level pendidikan, politik, dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya perubahan pola partisipasi masyarakat pesantren dari masa-masa sebelumnya. Lebih lanjut, diketahui bahwa provinsi Jawa Timur merupakan parameter utama tradisi kultural pesantren dengan segala ciri khasnya. *Nah*, disinilah rasional pentingnya penelitian ini dilakukan.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kecenderungan perilaku politik masyarakat pesantren dalam pemilihan kepala daerah (gubernur) di Jawa Timur?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi motivasi untuk menentukan pilihan politik santri dalam Pilgub Jawa Timur?

3. Bagaimana pola konfigurasi perilaku politik santri dalam pemilihan gubernur Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengukur peran dan partisipasi politik masyarakat pesantren pada pemilihan kepala daerah (gubernur).
- b. memahami faktor-faktor yang menjadi motivasi untuk menentukan pilihan politik santri dalam pilihan kepala daerah Jawa Timur.
- c. Memetakan konfigurasi perilaku politik masyarakat pesantren pada pemilihan kepala daerah (gubernur) di Provinsi Jawa Timur
- d. Memetakan figur ideal pemimpin Provinsi Jawa Timur pada pemilihan pemilihan kepala daerah (gubernur) di Provinsi Jawa Timur

1.4. Manfaat Penelitian

Dampak hasil kajian ini dibagi menjadi dua bagian, yakni secara teorik dan praktis

- Secara Teoritik

Hasil penelitian ini akan membantu menjelaskan signifikansi pergeseran posisi kiai dan tokoh pesantren di tengah perubahan sosial dan politik masyarakat Islam tradisional.
- Secara Praktis
 - a. Penelitian ini akan membantu menjelaskan konfigurasi partisipasi politik santri dalam pemilihan gubernur 2013.
 - b. Penelitian ini juga akan bermanfaat bagi Gubernur Jatim dalam menentukan program pemberdayaan bagi kalangan santri dan model diseminasinya.

1.5. Hasil yang Diharapkan

Dari uraian diatas, penelitian ini diharapkan mendapatkan gambaran secara objektif deskripsi peran dan partisipasi masyarakat pesantren dalam pemilihan Kepala Daerah (gubenur) di Provinsi Jawa Timur serta pengaruh program pemberdayaan berbasis

pesantren pada pilihan politik masyarakat pesantren di pemilihan kepala daerah (gubernur) Provinsi Jawa Timur.

1.6.Ruang Lingkup

Kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

1. Melakukan pemetaan pondok pesantren di Pasuruan, Lamongan dan Jombang yang akan diteliti
2. Penentuan masyarakat pondok pesantren yang akan menjadi unit analisis dari penelitian ini
3. Membuat indikator yang akan dijadikan acuan konseptual dalam studi tentang perilaku masyarakat pesantren dalam Pilkada (gubernur) Jawa Timur
4. Melakukan survei lapangan dengan menyebarkan kuesioner
5. Melakukan analisis ilmiah terhadap partisipasi politik masyarakat pesantren di Lamongan, Jombang dan Pasuruan
6. Melakukan interpretasi data yang sudah dikaji secara ilmiah

1.7.Kerangka Konsep

